

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Diajukan Oleh :

MAHDANUR I AMAL

502162152

Jurusan Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

Oleh:

MAHDANUR I AMAL

502162152

Program Studi: Akuntansi Syariah



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahdanur I Amal
Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa, 9 November 1998
NIM : 0502162152
Jurusan/ Semester : Akuntansi Syariah/ VIII
Alamat : Pinangan Dusun Amal no 31 Kec. Kebayakan No.
Hp : 082295427009

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya menjadi tanggung jawab penulis.

Dengan demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Mahdanur I Amal

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Oleh :

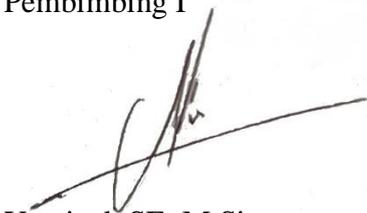
MAHDANUR I AMAL

NIM : 0502162152

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, Oktober 2020

Pembimbing I



Yusrizal, SE, M.Si

NIP. 19750522 200901 1 006

Pembimbing II



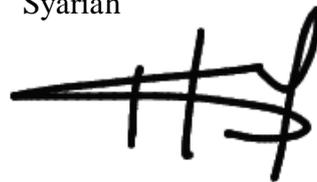
Dr. Kamilah, SE, Ak, M.Si, CA

NIP. 19791023 200801 2 014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Syariah



Hendra Harmain, SE..M.Pd

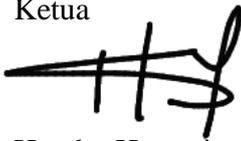
NIP.19730510 199803 1 003

PENGESAHAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah**” An. Mahdanur I Amal, NIM. 0502162152, Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 27 Oktober 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Hendra Harmain, S.E.M.Pd
NIDN.2010057302

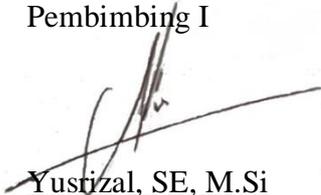
Sekretaris



Kusnilawaty, S.E, Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota

Pembimbing I



Yusrizal, SE, M.Si
NIDN. 2022057501

Pembimbing II



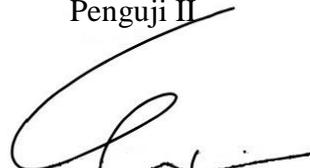
Dr. Kamilah, SE, Ak, M.Si, CA
NIDN.2023107901

Penguji I



Dr. Zuhrinal M Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

Penguji II



Agwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, M.A
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Mahdanur i amal , NIM 0502162152. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah”. Dibawah bimbingan Bapak Yusrizal, SE, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Dr. Kamilah, SE, Ak, M.Si, CA sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Secara parsial dan simultan. Mengkaji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Sarana Prasarana terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial dan simultan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sarana Prasarana berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Akan tetapi secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Sarana Prasarana berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya perhatian lebih terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan sarana dan prasarana daerah yang mana dalam rangka untuk meningkatkan PAD. khususnya retribusi daerah yang mana perbaikan pelayanan dan sarana pra sarana untuk perluasan basis retribusi dan pajak daerah. Karena, Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan PAD pada suatu pemerintahan daerah, maka diharapkan tingkat kemandirian semakin tinggi karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Sarana dan Prasarana, Kemandirian Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN-SU Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah beserta seluruh staf pegawainya.
4. Bapak Yusrizal, SE, M.Si. selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
5. Ibu Dr. Kamilah, SE, Ak, M.Si, CA selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai selesai.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Drs Hasim AR dan Ibunda Rohani, S.Pd yang telah mendoakan, mengorbankan dan menginspirasi secara moril dan material.

7. Terima kasih kepada adik tersayang Saura Ramadani, Khairunnisa dan Muhammad Jabbar yang telah menemani dalam penulisan skripsi dan memberi dukungan untuk penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh pengurus BPKAD Kabupaten Aceh Tengah yang telah banyak membantu penulis dengan memberi izin untuk memperoleh data agar skripsi ini cepat terselesaikan.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya yang tinggal satu atap sek yaitu Abangda Darwin Simangunsong, Abangda Arjuna dan Abanda Abdi Sandi.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus kepada AKS-E serta teman-teman yang sering mensupport saya dalam perjuangan selama perkuliahan atau dalam pembuatan skripsi ini yaitu Aziz Aulia, Muhammad Hafily Ritonga, Febrian Nanda, dan Befiriana Moniza..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Kemandirian Daerah.....	10
2. Keuangan Daerah.....	15
3. Hubungan keuangan daerah dan keuangan Negara.....	18
4. Pentingnya identifikasi faktor.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Hipotesa Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Data Penelitian.....	31
1. Jenis Data.....	31

2.	Sumber Data	31
E.	Teknik Pengumpulan Data	31
F.	Defenisi Operasional	32
1.	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	32
2.	Variabel Independen (Variabel Bebas)	33
G.	Teknik Analisis Data	35
1.	Analisis Deskriptif	35
2.	Uji Asumsi Klasik	36
3.	Analisis Regresi Linear	37
4.	Uji Hipotesis.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambaran Umum	40
B.	Deskripsi Data Penelitian	45
C.	Hasil Penelitian.....	46
1.	Analisis Statistik Deskriptif	45
2.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.	Uji Regresi Linear Berganda.....	49
4.	Uji Hipotesis.....	51
5.	Pembahasan.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
1.	Bagi Peneliti Selanjutnya	58
2.	Bagi Kabupaten Aceh Tengah	59
DAFTAR PUSTAKA		61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran, Realisasi dan Pertumbuhan PAD	2
Tabel 1.2	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan.....	2
Tabel 1.3	Rasio Kemandirian Daerah Kab Aceh Tengah.....	3
Tabel 2.1	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan.....	14
Tabel 2.2	Jenis dan Tarif Pajak Provinsi.....	20
Tabel 2.3	Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota	21
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
Tabel 4.1	Pertumbuhan Pajak Daerah	42
Tabel 4.2	Pertumbuhan Retribusi Daerah	42
Tabel 4.3	Sarana dan Prasaran Daerah.....	43
Tabel 4.4	Rasio kemandirian keuangan kab. Aceh Tengah.....	44
Tabel 4.5	Descriptive Statistics	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	51
Tabel 4.11	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	52
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	54
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	54

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Bentuk-bentuk Rumusan Masalah.....	28
Tabel 4.1	Scatterplot.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tengah yang dikenal sebagai daerah dengan ibu kota Takengon dengan yang masyarakat 230.512 jiwa dilihat dari BPS dengan jiwa proyeksi penduduk indonesia 2010-2020, daerah yang terkenal akan kopi gayonya ini adalah kabupaten yang kaya akan keanekaragaman tanaman perkebunan dan pertaniannya dan wisatanya. Daerah yang memiliki luas 4,318,19 km³ dan ketinggian antara 1200-1600 Mdpl ini adalah daerah yang berbukit-bukit yang biasa dikenal sebagai daerah yang dikelilingi bukit barisan dan memiliki danau ditengahnya yang dinamai Danau Lut Tawar. Dengan potensi yang ada diharapkan kabupaten aceh tengah menjadi kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

Dengan tingkat Kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.¹

Jika membahas tingkat kemandirian, Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskreksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.²

Berikut Share PAD dalam APBD dan realisasinya serta pertumbuhannya periode 2015-2019

¹ Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002), hal 128

² Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2018) hal 18

Tabel I.1
Anggaran, Realisasi dan Pertumbuhan PAD Periode 2015-2019

TAHUN	PAD		Pertumbuhan PAD
	TARGET	REALISASI	
2015	147.854 . 425.890	157.886.839.912	19,5494 %
2016	143.121.489.722	156.130.102.890	-1,1127 %
2017	156.824.996.423	163.000.739.413	4,4006 %
2018	153.064.444.080	150.818.710.372	-7,4736 %
2019	162.458.799.288	163.064.444.080	8,1195 %

Sumber : Data diolah 2020

Bisa dilihat di tabel di atas Pertumbuhan PAD Kab Aceh Tengah memiliki kecenderungan naik ini diharapkan akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

Untuk melihat pola ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat, bisa dilihat Berikut adalah tabel pola hubungan tingkat kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel I.2
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan,
dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif

Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim, 2001

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah³, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan tabel diatas tingkat kemandirian yang akan menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi pola ketergatangan pemerintah daerah, Indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah Rasio Kemandirian.

Berikut adalah rasio kemandirian daerah Kab Aceh Tengah periode 2015 sampai 2019

Tabel I.3

Rasio Kemandirian Daerah Kab. Aceh Tengah

³ Akhmad , *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Bogor: Azkiya Publishing, 2019) hal 171-172

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan	Pola hubungan
2015	13,64%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	11,38%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	12,11%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	13,85%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	14,77%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas untuk rasio kemandirian untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan dan pada tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan.

Namun, walaupun mengalami peningkatan Berdasarkan tabel 1.2 dan yang telah disajikan , rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 – 2019 masih termasuk dalam tingkat rendah sekali.

Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kriteria rendah sekali karena tingkat kemandirian keuangan daerahnya kurang dari 25 %. Menurut tabel 1.2 Pola hubungan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pemerintah pusat pada tahun 2015 – 2019 yaitu bersifat Pola hubungan Instruktif (0 – 25%) , merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

Jika melihat tabel 1.2 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Namun secara umum rasio kemandirian kabupaten aceh tengah masih kategori rendah sekali.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus, Kriteria rendah sekali ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah pula. Dengan potensi untuk pendapatan daerah yang dan usaha yang telah di laksanakan tentu ini perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu untuk melakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten aceh tengah. sehingga, langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Sehingga mengindikasikan adanya *Research Gap* dari variabel independen yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut.

Variabel pertama adalah Pajak daerah, secara umum pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD. Tingkat pertumbuhan pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan pada suatu pemerintahan daerah, maka diharapkan tingkat kemandirian semakin tinggi karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Pajak daerah pada penelitian Darmayasa dan Bagiada (2013) menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun di penelitian Rezqi Triganda (2018) menunjukkan bahwa Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari penelitian sebelumnya, Peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruhnya pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel kedua adalah Retribusi daerah, pada umumnya retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Tingkat pertumbuhan retribusi yang tinggi, Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, apabila

pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

Manasep Orocomna (2016) menemukan bahwa Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, Retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan di penelitian Haryanto (2006) Hasil penelitian menunjukkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan adanya *Reseach Gap* dari penelitian Manasep Orocomna 2016 dan Haryanto (2006) . Maka, perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh Retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah. Faktor-faktor yang diuji kembali dalam penelitian ini, yaitu Pajak daerah sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rezqi Triganda (2018), Darmayasa dan Bagiada (2013), Retribusi Daerah pada penelitian Manasep Orocomna (2016), Haryanto (2006) dan penambahan variabel sarana dan prasarana.

Variabel ketiga adalah sarana dan prasarana. Jika kita membahas sarana dan prasarana serta erat kaitannya pendapatan asli daerah tentunya. sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi dan sektor potensial untuk peningkatan PAD.
2. Pertumbuhan PAD 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan naik. Menunjukkan usaha usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah dan usaha untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat .
3. Rasio kemandirian untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan dan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan. Rasio kemandirian kab aceh tengah memiliki kecenderungan naik
4. Walau memiliki kecenderungan naik tapi melihat dari pola hubungan kemandirian dan Kemampuan keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kriteria rendah sekali.
5. Perlu adanya identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.
6. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat beberapa perbedaan hasil.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi batasan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar penelitian lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan melibatkan data Kabupaten Aceh Tengah periode 2015-2019. Penelitian dilakukan terutama untuk menganalisis variabel Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak daerah, berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Apakah Sarana dan Prasarana daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?
4. Apakah Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui apakah Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui apakah Sarana dan Prasarana Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Untuk mengetahui apakah Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi regional mengenai Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian teoritis berkaitan dengan ekonomi regional, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bagian informasi sekaligus sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan kinerja keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemandirian Daerah

a. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi untuk Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.⁴

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat pemberian pelayanan publik secara optimal. Faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah.⁵

Pelaksanaan Desentralisasi keuangan tidak lain dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah daerah agar dapat, *pertama*, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan *kedua*, meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk menstimulasi daerah menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Namun pada kenyataannya pemberian dana desentralisasi fiskal belum dapat memberikan perbaikan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Menurut Solihin & Lesatri (2010) Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang masih

⁴ Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2018) hal 18

⁵ Akhmad, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Bogor: Azkiya Publishing, 2019) hal 3

sangat bergantung kepada dana perimbangan fiskal yang diberikan Pemerintah Pusat.⁶

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan.⁷

b. Hubungan Kemandirian dan kinerja

Tingkat kemandirian yang tinggi mengindikasikan kinerja yang positif. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.⁸

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan pekerjaan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan." ⁹ (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 19)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan

⁶ Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian 2019, Jurnal Vol.2 No 4 Ari Mulianta Ginting p-ISSN NO 2527 2721e-ISSN no 2622 4399

⁷ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 134

⁸ Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002) hal 128

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bogor, SABIQ, 2011)

menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Dalam keuangan daerah, hal yang harusnya diperhatikan adalah kinerja keuangan daerahnya. Bukan hanya memperhatikan pendapatan atau kekayaan daerah tersebut seperti sumber daya alam dan manusia serta sumber pendapatan daerahnya. Tapi, kinerja keuangan daerah harus lebih diperhatikan. karena kalau kinerja keuangannya baik maka pemerintah daerah akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam pelayanan publik yang murah dan berkualitas, maka organisasi tersebut akan memperoleh kepercayaan dan dukungan publik. Kepercayaan dan dukungan publik ini penting bagi organisasi publik, karena mereka akan mempertanggungjawabkan kepada publik atas penggunaan dana yang diperolehnya dari publik.¹⁰

Penilaian kinerja keuangan secara rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan

¹⁰ Halim, Abdul. Dan Kusufi, M. Syam. *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). hal 129

laporan arus kas. Laporan Keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.¹¹

c. Pengukuran dan tingkat kemandirian daerah

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan di laporan APBD dan dilaksanakan yang tertera di laporan realisasi APBD. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah¹².

Agar dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Rasio Kemandirian akan menjadi Tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah.

¹¹ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 89

¹² Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat 2012

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.¹³

Rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.¹⁴ Rumus Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

¹³ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 140

¹⁴ Ibid

- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah.¹⁵

a. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁶

b. Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan memenuhi tujuan pengelolaan keuangan daerah yang mana adalah Kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

¹⁵ Akhmad , *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Bogor: Azkiya Publishing, 2019) hal 3

¹⁶ Ibid hal 32

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Seperti tampak pada Peraga 2.1 struktur utama APBD adalah :

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. pembiayaan daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

d. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secarik laporan keuangan publikasian yang terdapat di koran atau situs web pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih saksama. Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya.¹⁷ Adapun secara gratis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan publik

¹⁷ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 4

- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

1) komponen laporan keuangan pemerintah daerah

Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut.

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO).
- e) Laporan Arus Kas.
- f) Laporan Perubahan Ekuitas.
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Selain laporan keuangan pokok yang disebutkan sebelumnya, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory report*).¹⁸

3. Hubungan keuangan daerah dan keuangan negara

Keuangan daerah dengan keuangan negara pada dasarnya mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Dikatakan demikian karena penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan subsistem dari

¹⁸ Erlina, dkk. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, cet 4, 2018). hal 23

pemerintahan negara yang tidak terpisahkan. Pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁹

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilakukan berdasarkan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.²⁰

Karena tujuan pelimpahan wewenang tersebut atau bisa disebut pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokrasi di daerah.²¹

5. Pentingnya identifikasi faktor

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti

¹⁹ Akhmad, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Bogor: Azkiya Publishing, 2019) hal 34

²⁰ Ibid

²¹ Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2018) hal 2

daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan.²²

Perlu adanya identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.

Berikut faktor-faktor

a. Pajak daerah 82 83

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, Pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa; Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) diberikan kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak sebagai mana ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel II.2

Jenis dan Tarif Pajak Provinsi

Jenis Pajak		Tarif (Max)
1	Pajak kendaraan bermotor	1 S/D 2 % untuk kendaraan pertama 2 s/10 % untuk kendaraan kedua dan seterusnya
2	Bea balik Nama Kendaraan bermotor	Penyerahan pertama sebesar maksimum 20% penyerahan kedua dan seterusnya sebesar maksimum 1%
3	Pajak bahan bakar	Maksimum sebesar 10% dari nilai jual bahan

²² Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 134

	kendaraan bermotor	bakar
4	Pajak Air Permukaan; dan	Maksimum sebesar 10% dari nilai perolehan
5	Pajak Rokok	10 % dari cukai rokok

Tabel II.3
Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Jenis Pajak	Tarif (Max)
Pajak Hotel	– Paling tinggi sebesar 10 %
Pajak Restoran	– Paling tinggi sebesar 10 %
Pajak Hiburan	– Paling tinggi sebesar 35 %. – Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
Pajak Reklame	– Paling tinggi sebesar 25 %.
Pajak Penerangan Jalan	– Paling tinggi sebesar 10 %.
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	– Paling tinggi sebesar 25 %.
Pajak Parkir	– Paling tinggi sebesar 30 %.
Pajak Air Tanah	– Paling tinggi sebesar 20 %.
Pajak Sarang Burung Walet	– Paling tinggi sebesar 10 %.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	– Paling tinggi sebesar 0,3 %.
Bea Perolehan Hak atas	– Paling tinggi sebesar 5 %.

	Tanah dan Bangunan.	
--	---------------------	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

b. Retribusi daerah 100 an

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, Pasal 1 ayat 64 dikatakan bahwa; Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selanjutnya dalam Retribusi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 dikatakan bahwa objek retribusi daerah terdiri atas; (a) Jasa Umum; (b), Jasa Usaha; dan (c) Perizinan Tertentu. Untuk beberapa daerah retribusi daerah merupakan penyumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam arti memberi sumbangsih lebih besar dari pada pajak daerah. Retribusi pada dasarnya merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang diperoleh oleh pengguna retribusi. Retribusi daerah pada dasarnya dibagi atas tiga jenis yaitu; Jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: dapat berupa (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d), Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (n). Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kemudian dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi; (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Kemudian dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; dan (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana serta erat kaitannya pendapatan asli daerah tentunya. sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Layak atau tidak layak nya sarana dan prasarana sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Usaha pengadaan untuk peningkatan sarana prasarana daerah dengan Belanja modal untuk sarana pra sarana.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Penilliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rezqi Triganda	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kot a Di Provinsi Riau Tahun 2012 – 2015	Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau baik secara parsial maupun simultan.	a Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/K ota di

				Provinsi Riau dengan hasil pengujian $F_{hitung} > F_{tabel} (9,836 > 2,61023)$.
2	Manasep Orocomna, Paulus K. Allo Layuk, dan Elita Bharanti (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah Kabupaten teluk bintuni tahun 2010-2015	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak ,retribusi , dan tingkat ekonomi terhadap kemandirian daerah Kabupaten teluk bintuni tahun 2010-2015	Berdasarkan hasil simultan variabel yaitu pajak, retribusi dan tingkat ekonomi tidak memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kemandirian fiskal, namun pengaruh yang di berikan sangat sedikit sehingga untuk memenuhi kebutuhan pada daerah masih di butuhkan dana perimbangan untuk memenuhi kegiatan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni
3	Haryanto (2006)	Kemandirian Daerah Sebuah	Untuk meneliti tentang	Penelitian ini memperoleh hasil

		Perspektif dengan metode Path Analysis	Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis	bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.
4	Darmayasa dan Bagiada (2013)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan	Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak daerah, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian daerah.

C. Kerangka Pikiran

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan.²³

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem

²³ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 134

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah²⁴

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.²⁵

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.²⁶

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah²⁷.

Agar dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Rasio Kemandirian akan menjadi Tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.²⁸

Perlu adanya identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.

²⁴ PP 58 tahun 2005, pasal 4

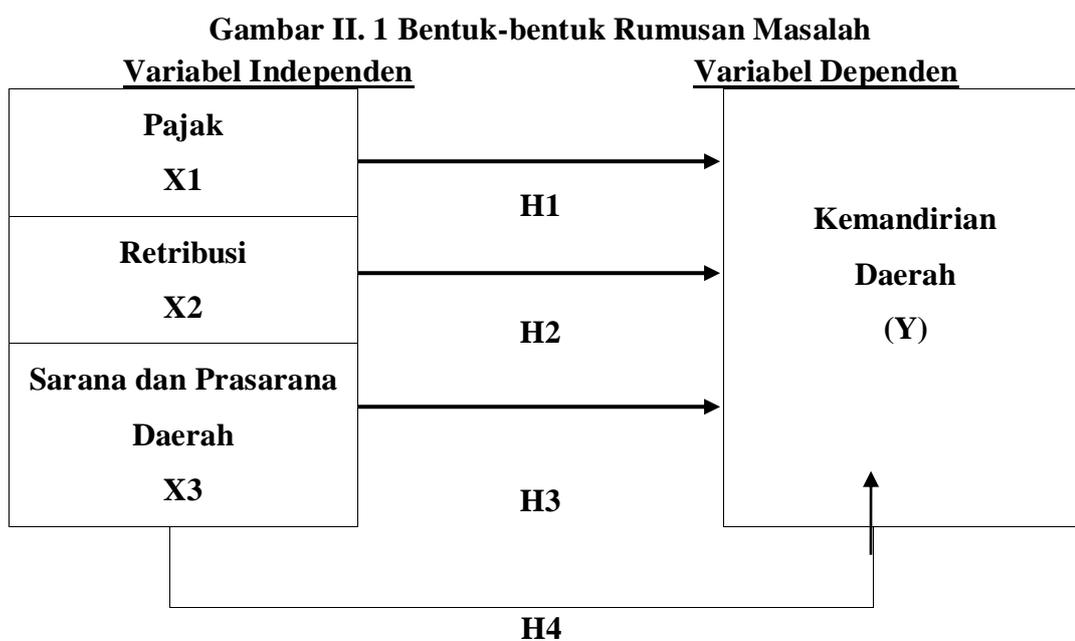
²⁵ Dedi Nordiawan. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007). h. 39

²⁶ Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat 2012). Hal 212

²⁷ Ibid

²⁸ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019). hal 140

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah, terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, maka perlu dikemukakan suatu kerangka konseptual, Dimana H₁, H₂, H₃, menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, sedangkan H₄ menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Secara umum pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat pertumbuhan pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan pada suatu pemerintahan daerah, maka semakin tinggi kemandirian daerah karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada umumnya Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Tingkat pertumbuhan retribusi yang tinggi, Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

H3 Sarana dan Prasarana Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sarana dan prasarana serta erat kaitannya pendapatan asli daerah tentunya. sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Layak atau tidak layaknya sarana dan prasarana sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H4: Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan beberapa kesimpulan sementara diatas maka dapat terlihat adanya hubungan secara parsial antara variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Sarana Prasarana) dengan variabel dependen (tingkat kemandirian keuangan daerah), sehingga peneliti tertarik untuk melihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal penelitian hingga pembuatan desain penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif adalah memperoleh penjelasan dari suatu teori dan hukum-hukum realitas.²⁹

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu dari juli 202 sampai agustus 2020

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan³⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah baik Laporan APBD maupun Laporan Realisasi APBD Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara berhati-hati dari populasi tersebut³¹. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.

²⁹ Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif*, 2018, h. 1.

³⁰ Arfan Ikhsan *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 105.

³¹ *Ibid.*, 106

Pertimbangan (kriteria) pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Tengah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tengah tahun 2012-2019.
2. Kabupaten Aceh Tengah yang mempublikasi laporan APBD dan laporan Realisasi APBD dalam situs Kementerian Keuangan Republik.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 terdiri 16 per periode yang mana 8 Laporan APBD dan 8 Laporan Realisasi APBD, dan juga 16 lagi per 1 semester tiap tahun dan juga 2 laporan PDRB tahun 2014-2018 dan 2015-2019.

Populasinya adalah semua laporan APBD dan laporan Realisasi APBD Aceh Tengah.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

2. Sumber Data

Jenis penelitian data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari **BPS ,BPKAD , website direktorat keuangan**. Jenis data ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan kabupaten aaceh tengah periode 2011-2019, laporan APBD periode 2011-2019, laporan realisasi APBD periode 2011-20019 , dan data-data statistik pendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data seperti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 2011 sampai 2019 sesuai data yang diperlukan yang tercantum didalam website kementrian keuangan dan data yang digunakan diperoleh dari BPS tahun 2019. Selain itu metode pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur, buku – buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

. Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol/lambang (umumnya digunakan symbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Cara paling bermanfaat dalam menggolong-golongkan variabel adalah dengan membeda-bedakannya menjadi variabel independen dan variabel dependen³². Variabel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen.

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara sistematis disimbolkan dengan huruf y³³. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Variabel Independen

³² Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisni*, h. 66

³³ *Ibid.*, 67

Variabel Independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf x . Jumlah variabel ini tidak terbatas dalam sebuah model penelitian³⁴. Variabel independen dalam penelitian ini akan diuraikan dalam pernyataan dibawah ini.

a. Pertumbuhan Pajak (X₁)

Pajak daerah, secara umum pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD. Tingkat pertumbuhan pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan pada suatu pemerintahan daerah, maka diharapkan tingkat kemandirian semakin tinggi karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

b. Pertumbuhan Retribusi Daerah (X₂)

Pada umumnya retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Tingkat pertumbuhan retribusi yang tinggi, Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

c. Sarana dan Prasarana Daerah (X₃)

Jika kita membahas sarana dan prasarana serta erat kaitannya pendapatan asli daerah tentunya. sarana dan prasarana harus memadai

³⁴ *Ibid*

dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Independen		
Pertumbuhan Pajak Daerah (X₁)	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan Retribusi Daerah (X₂)	$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Sarana dan Prasarana Daerah (X₃)	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal Daerah}}{\text{Target Belanja Modal Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dependen		
Tingkat Kemandirian Daerah (Y)	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah regresi berganda, karena membahas tentang tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan

dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 20.0. alat diatas digunakan untuk mempermudah didalam penelitian.

Beberapa teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Asumsi Klasik.

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik³⁵. Analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis., dan apabila terjadi penyimpangan didalam pengujian maka perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Ada beberapa pengujian klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov-Sminov*. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi $> ,05$ atau 5% maka data terdistribusi secara normal dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Waston* (DW), yaitu:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi

³⁵ Syafina, *Panduan Penelitian*, h. 22.

3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.³⁶

c. Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen., yaitu jika variabel independen mempunyai nilai VIF tidak melebihi 4 atau 5 berarti tidak terjadi multikolinearitas.³⁷

d. Uji Heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan. Hasil uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heterokedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5%.³⁸

³⁶ Ikhsan, *Metodologi Penilitin Bisnis*, h. 186

³⁷ *Ibid.*, h. 187.

³⁸ *Ibid.*, h. 188.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi)³⁹. Penelitian ini menjabarkan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

Program aplikasi SPSS sebagai alat untuk membantu dalam metode analisis data. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Sarana Prasarana Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. maka akan diketahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh ukuran, , Pajak daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Sarana Prasarana Daerah (X3), dan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.⁴⁰

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

a = Konstanta

X_1 = Pertumbuhan Pajak Daerah (PPD)

X_2 = Pertumbuhan Retribusi Daerah (PRD)

X_3 = Sarana prasarana daerah (SPD)

³⁹ Syafina, *Panduan Penelitian*, h. 16.

⁴⁰ [Hhttp://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html](http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html)

Y	= Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3, X_4
e	= Gangguan

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut⁴¹. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat⁴². Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji, yaitu :

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁴³

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat⁴⁴. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah :

⁴¹ Syafina, *Panduan Penelitian*, h. 35.

⁴² *Ibid.*, h. 36.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, h 39.

- 1) Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai Sig. $t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial H1, H2, Dan H3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai Sig. $t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial H1, H2, dan H3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen⁴⁵. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- 1) Jika F hitung $> F$ tabel dan nilai Sig. $F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika F hitung $< F$ tabel dan nilai Sig. $F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H4 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 37.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut *Schimidt Ferguson*. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm, terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm.

Topografi rata-rata 1000 m dpl, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar $20,10^{\circ}\text{C}$, dimana pada bulan April dan merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai $26,6^{\circ}\text{C}$, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu $19,70^{\circ}\text{C}$. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.

a. Luas dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,13 Ha yang secara geografis terletak pada $04^{\circ}10' 33'' - 05^{\circ}57' 50''$ LU dan $95^{\circ} 15' 40'' - 97^{\circ} 20' 25''$ BT. Batas administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen
Sebelah Selatan	Gayo Lues dan Nagan Raya

Sebelah Utara	Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen
Sebelah Selatan	Gayo Lues dan Nagan Raya
Sebelah Timur	Aceh Timur
Sebelah Barat	Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

Daerah dengan ibukota takengon dengan yang masyarakat 230.512 jiwa dilihat dari BPS dengan jiwa Proyeksi Penduduk indonesia 2010-2020.

Kabupaten Aceh Tengah adalah kabupaten yang kaya akan keanekaragaman tanaman perkebunan dan pertaniannya , juga kabupaten yang kaya akan sektor wisatanya. Daerah yang memiliki luas 4,318,19 km³ dan ketinggian antara 1000-1400 mdpl ini dikelilingi oleh bukit-bukit tau bisa disebut dikelilingi bukit barisan dan memiliki danau ditengahnya yang dinamai danau lut tawar serta tempat wisata lainnya seperti ari terjun dan tempat wisata budaya legenda seperti batu belah, kerajaan lingga (linge), gua-gua bersejarah, dan lainnya. Aceh tengah termasuk dalam jajaran kabupaten yang memiliki banyak sektor yang bisa dijadikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun kondisi pajak daerah, retribusi daerah, sarana prasarana daerah di kabupaten aceh tengah adalah sebagai berikut.

Pajak daerah

Variabel pajak daerah disini dilihat dari rasio pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan pada suatu pemerintahan daerah, maka diharapkan tingkat kemandirian semakin tinggi karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Berikut adalah tingkat pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun:

Tabel 4.1

Pertumbuhan Pajak Daerah

TAHUN	Pajak Daerah		Rasio Pertumbuhan
	Target	Realisasi	
2012	5.327.794.000,00	5.060.477.081	25,8075
2013	5.327.794.000,00	5.929.486.657	17,1725
2014	5.832.794.000,00	6.685.996.921	12,7584
2015	7.222.894.000,00	9.838.059.366	47,1442
2016	9.564.894.000,00	11.465.487.062	16,5422
2017	10.684.794.000,00	11.022.306.411	-3,8653
2018	11.373.500.000,00	11.735.708.817	6,4724
2019	11.373.500.000,00	11.373.500.000	-3,0864

Sumber : data diolah 2020

Retribusi Daerah

Variabel retribusi daerah juga disini dilihat dari rasio pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan retribusi yang tinggi, Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

Tabel 4.2

Pertumbuhan Retribusi Daerah

TAHUN	Retribusi Daerah		Rasio Pertumbuhan
	Target	Realisasi	
2012	11.682.648.000	6.782.789.904	-45,7152
2013	15.111.444.000	7.315.624.211	7,8557
2014	14.203.046.500	9.999.224.701	36,6831
2015	11.983.030.500	7.698.231.984	-23,0117
2016	12.083.030.500	6.063.907.207	-21,2299
2017	12.348.014.500	5.597.836.308	-7,6860
2018	12.565.119.000	5.316.629.380	-5,0235
2019	8.401.905.000	7.397.026.200	39,1300

Sumber : data diolah 2020

Sarana dan prasarana. Jika kita membahas sarana dan prasarana serta erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah tentunya, sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana daerah seperti Irigasi ,Perairan ,Jalan yang akan meningkatkan sektor potensial untuk penerimaan PAD.

Usaha pemerintah untuk pengadaan sarana prasarana daerah bisa dilihat dari belanja modal. Dan dilihat dari rasio pertumbuhan sarana dan prasarana untuk melihat tingkat usaha pemerintah daerah dalam pengadaan sarana prasarana dari tahun ketahun. Berikut adalah rasio pertumbuhan sarana dan prasarana daerah dari tahun ketahun :

Tabel 4.3
Sarana prasarana daerah

TAHUN	BELANJA MODAL		Rasio pertumbuhan
	TARGET	REALISASI	
2012	116.064.933.784	134.530.789.327	0,1521
2013	117.561.785.826	128.030.161.649	-4,8321
2014	229.810.026.116	251.948.329.876	96,7883
2015	265.397.385.497	384.854.442.208	52,7513
2016	200.000.000.000	512.060.288.509	33,0530
2017	341.773.816.072	411.264.451.094	-19,6844
2018	188.295.125.750	180.831.285.122	-56,0304
2019	77.170.399.868	188.295.125.750	4,1275

Sumber : data diolah 2020

Tingkat kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat dan propinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya⁴⁶.

Berikut adalah rasio kemandirian di kabupaten aceh tengah dari tahun ke tahun :

Tabel 4.4
Rasio kemandirian keuangan kab. Aceh Tengah

Tahun	Pendapatan transfer	Pinjaman	PAD	Rasio Kemandirian
2011	591.515.945.281,00		20.780.854.963,00	3,5132
2012	608.160.134.965,00		55.832.062.049,73	9,1805
2013	650.326.107.399,00		76.870.446.782,00	11,8203
2014	719.818.795.928,00		132.068.284.863,00	18,3474
2015	974.041.149.861,56	183.869.242.798	157.886.839.912,16	13,6355
2016	1.372.491.975.532,32	-	156.130.102.890,16	11,3757
2017	1.345.717.132.577,18	-	163.000.739.413,09	12,1126
2018	1.089.142.240.076,51	-	150.818.710.372,27	13,8475
2019	1.103.859.536.884		190.280.802.870,00	17,2378

Sumber : data diolah 2020

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel-variabel bebas tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah dan sarana pra sarana. variabel terikat adalah Kemandirian Keuangan Daerah. Pada bab IV ini akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product an Service Sollution*) *version 20 for windows*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah baik Laporan APBD maupun Laporan Realisasi APBD Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan APBD dan laporan Realisasi APBD

⁴⁶ Mahmudi (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta hal 140

Aceh Tengah tahun 2012-2019 Dan juga laporan APBD dan laporan Realisasi APBD Aceh Tengah per 1 semester tahun 2012-2019.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif memberikan informasi atau gambaran terkait dengan data yang terdiri dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.

Tabel 4.5

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK (X1)	32	-24,8969	33,2079	10,495984	14,8524485
RETRIBUSI (X2)	32	-55,2897	74,6483	-4,388344	35,4258994
SARANA PRA SARANA (X3)	32	-94,8879	96,7883	13,638409	58,0830542
KEMANDIRIAN DAERAH (Y)	32	9,1805	18,3474	13,416109	2,9085533
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Hasil analisis output diatas menjelaskan :

- a) Jumlah data (N) masing-masing pada variabel Pajak , Retribusi dan Sarana dan Prasarana adalah 32 data dan semuanya dinyatakan valid. Ini berarti, tidak ada data yang tidak valid/hilang (*missing*).
- b) Nilai minimum atau terendah dari variabel Pajak adalah -24,8969, dan nilai minimum Retribusi adalah -55,2897, sedangkan Sarana dan Prasarana sebesar -94,8879.
- c) Nilai Maksimum atau nilai tertinggi dari variabel Pajak adalah -33,2079, dan nilai maximum Retribusi adalah 74,6483 sedangkan Sarana dan Prasarana sebesar 96,7883.
- d)**
- e) Deviasi Standar (Standar Deviation) mengukur rata-rata penyimpangan masing-masing item data terhadap nilai yang diharapkan. Deviasi standar ini juga dapat disebut nilai simpangan baku. Deviasi Standar

dari variabel Pajak adalah 14,8524485, Retribusi adalah 35,4258994, sedangkan Sarana dan Prasarana sebesar 58,0830542.

f)

2. Uji Asumsi Klasik

Suatu regresi dengan menggunakan metode estimasi *Ordinary least Squares* (OLS) akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. Adapun Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal maka harus di uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan aplikasi software statistik SPSS v.20.0.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		PAJAK (X1)	RETRIBUSI (X2)	SARANA PRA SARANA (X3)	KEMANDIRIA N DAERAH (Y)
N		32	32	32	32
Normal	Mean	10,495984	-4,388344	13,638409	13,416109
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	14,8524485	35,4258994	58,0830542	2,9085533
Most Extreme Differences	Absolute	,123	,109	,136	,191
	Positive	,066	,109	,136	,191
	Negative	-,123	-,104	-,128	-,151
Kolmogorov-Smirnov Z		,696	,617	,769	1,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,718	,842	,596	,193

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Dari Tabel 4.19 hasil uji normalitas diatas menunjukkan hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dari nilai yang ditunjukkan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada pengujian ini sudah berdistribusi normal. Hal ini bisa dibuktikan dari nilai dan signifikansi variabel yang $>$ nilai alpha (0,05). Di mana nilai dan signifikansi variabel yaitu 0.718, 0.842 , 0.596, 0,193 $>$ 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7
Uji Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 ^a	,679	,644	1,7345548	1,127

a. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Untuk uji autokorelasi Nilai du dicari pada distribusi nilai tabel durbin watson berdasarkan k(3) dan N(32) dengan signifikansi 5% .

Jika dilihat dari tabel 4.7 dengan Du (1,165) $<$ durbin watson. maka (1,127) $<$ 4-du(2,350). Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan Tidak ada gejala autokorelasi

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk membuktikannya, peneliti menggunakan cara dengan melihat nilai *Tolerancedan Variance Inflation Factor* (VIF). Nantinya Model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* \geq 0,10 dan nilai VIF \leq dari 10. Berikut hasil pengujian multikolinieritas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14,168	,382		37,095	,000		
	PAJAK (X1)	-,056	,022	-,284	-2,492	,019	,880	1,136
	RETRIBUSI (X2)	,055	,012	,669	4,669	,000	,558	1,791
	SARANA PRA SARANA (X3)	,005	,007	,109	,760	,453	,558	1,791

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

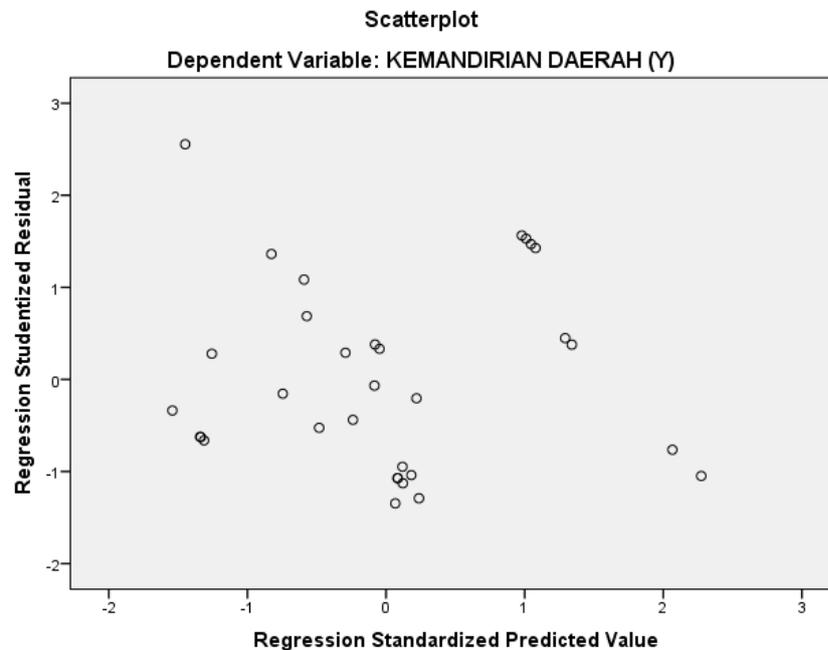
Pada tabel 4. Dari output spss diatas terlihat hasil uji multikolinieritasnya. Hasil yang diperoleh dari keempat variabel (PMK, SPI, KSDM danPTI) adalah tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Tolerance* setiap variabel $> 0,01$ dan nilai VIF-nya < 10 . Di mana nilai *Tolerance* masing-masing variabel adalah Pajak Daerah 0,880, Retribusi Daerah 0,558, dan Sarana Prasarana Daerah 0,558. Sedangkan nilai VIF-nya masing-masing adalah Pajak Daerah 1,136, Retribusi Daerah 1,791, Sarana Prasarana Daerah 1,791.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Baiknya suatu regresi seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas.

Bisa di lihat dari hasil output spss 20 berupa Scatter plot dibawah ini.

Gambar 4.1



Sumber: Output SPSS v.20.0.

Menurut imam ghozali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Tidak ada gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan data pada kuesioner, seperti yang digambarkan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel Pajak Daerah, retribusi Daerah, dan Sarana dan Prasarana terhadap Kemandirian keuangan daerah

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,168	,382		37,095	,000		
	PAJAK (X1)	-,056	,022	-,284	-2,492	,019	,880	1,136
	RETRIBUSI (X2)	,055	,012	,669	4,669	,000	,558	1,791
	SARANA PRA SARANA (X3)	,005	,007	,109	,760	,453	,558	1,791

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Berdasarkan dari hasil tabel 4. rumus regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = 14,168 - 0,056 X_1 + 0,055 X_2 + 0,005 X_3 + e$$

- a) Konstanta bernilai sebesar 14,168 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan. Angka tersebut bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
- b) Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar - 0,056 dan bernilai NEGATIF. Hal ini menyatakan bahwa variabel pajak daerah menunjukkan arah yang tidak searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- c) Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar + 0,055 dan bernilai positif. Hal ini menyatakan bahwa variabel Retribusi Daerah menunjukkan arah yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

- d) Koefisien regresi Sarana dan prasarana sebesar 0,005 dan bernilai positif. Hal ini menyatakan bahwa variabel Sarana dan Prasarana menunjukkan arah yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menemukan besarnya tingkat kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel independen. Angka yang menjadi acuan koefisien determinasi adalah nilai *R Square*.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 ^a	,679	,644	1,7345548	1,127

a. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Pada tabel 4. menunjukkan bahwa *R Square* sebesar 0,679. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel bebas yaitu praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menerangkan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan sebesar 67,9%, sisanya 32,1% dijelaskan oleh variabel di luar model.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dapat dilihat pada tabel coefficient (β) yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t statistik kini pun

dibutuhkan untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan sarana prasarana mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,168	,382		37,095	,000		
	PAJAK (X1)	-,056	,022	-,284	-2,492	,019	,880	1,136
	RETRIBUSI (X2)	,055	,012	,669	4,669	,000	,558	1,791
	SARANA PRA SARANA (X3)	,005	,007	,109	,760	,453	,558	1,791

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Koefisien thitung menunjukkan bahwa variabel praktik Pajak Daerah (X1) mempunyai nilai thitung sebesar -2,492 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,048 atau dapat dikatakan variabel Pajak Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$. H_1 ditolak, hal ini dapat disimpulkan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah.

2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil koefisien thitung menunjukkan bahwa variabel sistem Retribusi daerah (X2) mempunyai nilai thitung sebesar 4,669 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,048 atau dapat dikatakan variabel Retribusi Daerah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$. H_2 diterima, hal ini dapat disimpulkan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah.

3) Pengaruh Sarana Prasarana Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Sarana dan Prasarana daerah (X3) mempunyai nilai thitung sebesar 0,760 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,048 atau dapat dikatakan variabel Sarana Prasarana Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,453 > 0,05$. H_3 ditolak, hal ini dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik pada intinya yaitu menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengaruhnya pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara membandingkan besar nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung $>$ dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	178,007	3	59,336	19,722	,000 ^b
Residual	84,243	28	3,009		
Total	262,250	31			

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

b. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

Sumber: Output SPSS v.20.0

Dari hasil perhitungan pada table 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000^b dan nilai F hitung sebesar 19,722. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari pada F table 2,92, maka dengan itu H₄ diterima. Jadi, dalam hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan sarana prasana terhadap kemandirian keuangan daerah. Berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.13

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 ^a	,679	,644	1,7345548	1,127

a. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0

Bisa dilihat dari hasil input spss diatas bahwa variabel pajak daerah (X1) retribusi daerah (X2) dan sarana pra sarana (X3) berpengaruh 67,9 persen terhadap kemandiran keuangan daerah y secara simultan.

5. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih mendalam akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar -2,492 . lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,048

atau dapat dikatakan variabel Pajak Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$. H₁ ditolak, hal ini dapat disimpulkan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah.

Menurut hasil pengujian hipotesis Kontribusi Pajak daerah -0,709 kontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Berpengaruh negatif terhadap kemandirian aceh tengah.

Secara umum pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD. Tingkat pertumbuhan pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya penerimaan pada suatu pemerintahan daerah, maka diharapkan tingkat kemandirian semakin tinggi karena mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Pertumbuhan Pajak daerah mengalami trend penurunan atau kecenderungan turun khususnya selama 6 tahun terakhir. Ini

mengindikasikan Realisasi penerimaan pajak daerah masih kurang di pemerintahan daerah kabupaten aceh tengah.

H₂: Retribusi daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Retribusi daerah terhadap kemandirian menurut hasil uji hipotesis ditemukan berarah positif dan signifikan. Dasarnya ialah dari nilai signifikansinya $0,006 < \alpha 0,05$ dengan koefisien 4,669 (positif) dan lebih besar dari t tabel 2,048. Hal ini berarti Retribusi Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. oleh karena itu maka H₂ diterima.

Pada umumnya Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Tingkat pertumbuhan retribusi yang tinggi, Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.⁴⁷

Karena retribusi ini mengenai pelayanan. Maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut.⁴⁸ selain perbaikan juga perluasan basis retribusi, pengendalian atas

⁴⁷ Mahmudi *Manajemen Keuangan Daerah* hal 25

⁴⁸ Ibid

kebocoran penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi⁴⁹

Fakta ini bisa dilihat dari retribusi daerah di APBD, pemerintah daerah dalam menganggarkan retribusi daerah selalu dengan nominal yang besar .namun, realisasi retribusi daerah masih lebih rendah dari yang dianggarkan.

H₃ Sarana dan Prasarana Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan menunjukkan bahwa variabel Sarana dan Prasarana daerah (X3) mempunyai nilai thitung sebesar 0,760 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,048 atau dapat dikatakan variabel Sarana Prasarana Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,453 > 0,05$. H₃ ditolak, hal ini dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah.

Sarana dan prasarana erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah. sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Layak atau tidak layaknya sarana dan prasarana sarana dan prasarana harus memadai dalam menunjang kegiatan operasional yang sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan PAD yang dimaksud adalah jika Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah memadai maka pemerintah daerah akan mendapatkan pungutan atas Pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.

Retribusi Jasa Umum adalah: dapat berupa (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi

⁴⁹ Ibid

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d), Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (n). Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pemerintah kabupaten aceh tengah harus lebih memperhatikan pelayanan tersebut diatas dari yang paling rendah kontribusinya terhadap PAD sampai yang paling tinggi kontribusinya

H₄: Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan beberapa kesimpulan sementara diatas maka dapat terlihat adanya hubungan secara parsial antara variabel independen (Pajak daerah, Retribusi Daerah, sarana dan prasarana) dengan variabel dependen (tingkat kemandirian keuangan daerah), sehingga peneliti tertarik untuk melihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Hasil pengujian hipotesis keempat yang telah dilakukan bahwa secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah , dan sarana dan prasarana daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di kabupaten Aceh Tengah . Kesimpulan ini terbukti dari hasil uji data yang telah dilakukan bahwa nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya 19,722 lebih besar 2,92. Maka dari itu maka H₀ ditolak dan H₄ diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Maka dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Sarana dan Prasarana tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah di Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. **Bagi pemerintah kabupaten aceh tengah**
 - a. Retribusi daerah menurut hasil penelitian adalah yang paling berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten aceh tengah. Retribusi daerah perlu perhatian lebih. Fakta ini bisa dilihat dari retribusi daerah di APBD, pemerintah daerah dalam menganggarkan retribusi daerah selalu dengan nominal yang besar.

namun, realisasi retribusi daerah masih lebih rendah dari yang dianggarkan. Karena retribusi ini mengenai pelayanan. Perbaikan pelayanan tersebut adalah tindakan yang diharapkan. selain perbaikan juga perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi yang diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan retribusi.

- b. Sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan lagi. dengan meningkatkan sarana dan prasarana daerah seperti Irigasi ,Perairan ,Jalan yang akan meningkatkan sektor potensial untuk penerimaan PAD diharapkan akan meningkatkan penerimaan PAD dan kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian, agar hasil penelitian yang didapat lebih representatif.
- b. Peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang mengenai variabel Pajak daerah, Retribusi daerah dan Sarana dan Prasarana Daerah dan Kemandirian keuangan daerah dengan mengeksplorasi kembali indikator-indikator untuk mengukur setiap variabelnya.
- c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait dengan kemandirian keuangan daerah pada keuangan pemerintah daerah khususnya pada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad , *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkiya Publishing, 2019
- Depatremen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bogor, SABIQ, 2011)
- Erlina, dkk. *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat, cet 4, 2018
- Ginting Ari Mulianta. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian* 2019, Jurnal Vol.2 No 4 p-ISSN NO 2527 2721e-ISSN no 2622 4399
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat 2012
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002.
- Halim,abdul Dan Kusufi, m.syam. *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). hal 129
- Hhttp://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linearberganda.html
- Ikhsan, Arfan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2014
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2018
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM Ilmu Manajemen YKPN, 2019
- Syafina, Laylan. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan: Febi Pers, 2018

LAMPIRAN I

APBD per periode
2012

Uraian	2012	2013	2014
Pendapatan	615.417,69	718.033,15	939.324,36
PAD	23.465,44	73.668,29	81.514,89
Pajak daerah	5.327,79	5.327,79	5.832,79
Retribusi daerah	11.682,65	15.111,44	14.203,05
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.600,00	2.600,00	3.050,00
Lain-lain PAD yang sah	3.855,00	50.629,05	58.429,05
Dana Perimbangan	526.848,52	585.918,75	641.321,48
DBH	30.878,26	30.252,40	28.183,86
DAU	449.223,04	513.863,04	564.691,53
DAK	46.747,21	41.803,31	48.446,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.103,73	58.446,11	216.487,99
Hibah	0,00		
Dana darurat	0,00		4.496,59
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	9.454,79	10.498,67	12.510,79
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	55.336,95	47.633,95	47.931,83
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	0,00	313,50	151.548,78
Lain-lain	311,98		
Belanja	613.520,64	740.486,11	1.009.505,67
Belanja Tidak Langsung	409.853,77	463.563,51	562.278,11
Belanja Pegawai	370.571,32	417.465,20	436.731,45
Belanja Bunga	68,66	68,66	38,00
Belanja Subsidi	0,00		
Belanja Hibah	13.995,00	5.004,90	11.312,00
Belanja Bantuan sosial	918,79	9.771,94	
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	0,00		77.702,13
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	23.300,00	29.752,80	34.994,53

Belanja tidak terduga	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Belanja Langsung	203.666,87	276.922,60	447.227,56
Belanja Pegawai	27.528,54	55.094,95	66.902,08
Belanja Barang dan jasa	60.073,40	104.265,86	150.515,46
Belanja Modal	116.064,93	117.561,79	229.810,03
Pembiayaan Netto	-1.897,04	22.452,96	70.181,31
Penerimaan Pembiayaan	0,00	25.000,00	73.078,35
SILPA TA sebelumnya	0,00	25.000,00	73.078,35
Pencairan dana cadangan	0,00		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00		
Pengeluaran Pembiayaan	1.897,04	2.547,04	2.897,04
Pembentukan Dana Cadangan	0,00		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.850,00	2.500,00	2.850,00
Pembayaran Pokok Utang	47,04	47,04	47,04
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00		
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00		

Uraian	2015	2016	2017
Pendapatan	1.204.617	1.237.420.459.852	1.500.755.341.736
PAD	147.854	143.121.489.722	156.824.996.423
Pajak daerah	7.223	9.564.894.000	10.684.794.000
Retribusi daerah	11.983	12.083.030.500	12.348.014.500
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.300	4.900.000.000	5.150.000.000
Lain-lain PAD yang sah	125.349	116.573.565.222	128.642.187.923

Dana Perimbangan	667.174	739.487.475.000	878.418.088.406
DBH	28.168	27.498.148.000	21.554.011.406
DAU	579.833	613.313.520.000	613.313.520.000
DAK	59.173	98.675.807.000	243.550.557.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	389.588	354.811.495.130	465.512.256.907
Hibah			-
Dana darurat			-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	29.575	25.490.557.670	23.028.396.448
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	176.144	173.740.512.000	275.652.540.000
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	183.869	155.580.425.460	166.831.320.459
Lain-lain			-
Belanja	1.259.170	1.274.169.317.732	1.497.208.299.616
Belanja Tidak Langsung	716.529	799.887.691.015	838.714.660.326
Belanja Pegawai	509.265	524.437.987.393	527.732.012.963
Belanja Bunga	38	25.000.000	25.000.000
Belanja Subsidi			-
Belanja Hibah	2.616	17.575.000.000	4.458.000.000
Belanja Bantuan sosial	61.698	14.675.090.000	14.751.150.000
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1.921	2.164.792.450	2.303.280.850

Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	138.991	239.009.821.172	285.245.216.513
Belanja tidak terduga	2.000	2.000.000.000	4.200.000.000
Belanja Langsung	542.641	474.281.626.717	658.493.639.290
Belanja Pegawai	92.543	85.341.733.873	87.961.863.506
Belanja Barang dan jasa	184.701	175.831.892.945	228.757.959.712
Belanja Modal	265.397	213.107.999.899	341.773.816.072
Pembiayaan Netto	54.553	36.748.857.880	(3.547.042.120)
Penerimaan Pembiayaan	56.500	38.645.900.000	-
SILPA TA sebelumnya	56.500	38.645.900.000	-
Pencairan dana cadangan			-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			-
Pengeluaran Pembiayaan	1.947	1.897.042.120	3.547.042.120
Pembentukan Dana Cadangan			-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.900	1.850.000.000	3.500.000.000
Pembayaran Pokok Utang	47	47.042.120	47.042.120
Pemberian Pinjaman Daerah			-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan			-

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga			-

Uraian	2018	2019
Pendapatan	1.256.923.980.964	1.076.588.947.357
PAD	153.064.444.080	162.458.799.288
Pajak daerah	11.373.500.000	11.373.500.000
Retribusi daerah	12.565.119.000	8.401.905.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.300.000.000	5.500.000.000
Lain-lain PAD yang sah	123.825.825.080	137.183.394.288
Dana Perimbangan	841.794.303.000	640.957.609.000
DBH	16.607.314.000	17.255.681.000
DAU	603.737.495.000	623.701.928.000
DAK	221.449.494.000	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	262.065.233.884	273.172.539.069
Hibah	-	22.226.800.000
Dana darurat	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	29.388.687.884	29.509.076.069
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	232.676.546.000	221.436.663.000
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Belanja	1.287.176.938.844	1.084.465.426.297
Belanja Tidak Langsung	766.405.926.014	716.099.074.009
Belanja Pegawai	475.818.244.842	402.812.717.237
Belanja Bunga	10.000.000	3.000.000
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	6.742.600.000	2.880.000.000
Belanja Bantuan sosial	14.721.950.000	15.721.950.000
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	2.393.861.900	1.977.540.500
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	260.644.169.272	286.215.566.272

Belanja tidak terduga	6.075.100.000	6.488.300.000
Belanja Langsung	520.771.012.830	368.366.352.288
Belanja Pegawai	108.942.091.182	109.556.967.388
Belanja Barang dan jasa	223.533.795.898	181.638.985.032
Belanja Modal	188.295.125.750	77.170.399.868
Surplus/Defisit	(252.957.880)	7.876.478.940
Pembiayaan Daerah	252.957.880	7.900.000.000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	7.900.000.000
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	2.000.000.000	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	23.521.060
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.747.042.120	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.700.000.000	23.521.060
Pembayaran Pokok Utang	47.042.120	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
SILPA	-	-

APBD per semester 1

Uraian	2012	2013	2014
Pendapatan	307.708,84	359.016,57	469.662,18
PAD	11.732,72	36.834,14	40.757,44
Pajak daerah	2.663,90	2.663,90	2.916,40
Retribusi daerah	5.841,32	7.555,72	7.101,52
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.300,00	1.300,00	1.525,00
Lain-lain PAD yang sah	1.927,50	25.314,52	29.214,52
Dana Perimbangan	263.424,26	292.959,37	320.660,74
DBH	15.439,13	15.126,20	14.091,93
DAU	224.611,52	256.931,52	282.345,76
DAK	23.373,61	20.901,66	24.223,05
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32.551,86	29.223,06	108.244,00
Hibah	0,00	0,00	0,00

Dana darurat	0,00	0,00	2.248,30
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	4.727,40	5.249,33	6.255,39
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	27.668,48	23.816,97	23.965,92
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	0,00	156,75	75.774,39
Lain-lain	155,99	0,00	0,00
Belanja	306.760,32	370.243,05	504.752,84
Belanja Tidak Langsung	204.926,89	231.781,75	281.139,06
Belanja Pegawai	185.285,66	208.732,60	218.365,72
Belanja Bunga	34,33	34,33	19,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	6.997,50	2.502,45	5.656,00
Belanja Bantuan sosial	459,40	4.885,97	0,00
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	38.851,07
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	11.650,00	14.876,40	17.497,27
Belanja tidak terduga	500,00	750,00	750,00
Belanja Langsung	101.833,44	138.461,30	223.613,78
Belanja Pegawai	13.764,27	27.547,48	33.451,04
Belanja Barang dan jasa	30.036,70	52.132,93	75.257,73
Belanja Modal	58.032,47	58.780,89	114.905,01
Pembiayaan Netto	-948,52	11.226,48	35.090,65
Penerimaan Pembiayaan	0,00	12.500,00	36.539,18
SiLPA TA sebelumnya	0,00	12.500,00	36.539,18
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	948,52	1.273,52	1.448,52
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	925,00	1.250,00	1.425,00
Pembayaran Pokok Utang	23,52	23,52	23,52
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00

Uraian	2015	2016	2017
Pendapatan	602308,5	618.710.229.926	750.377.670.868
PAD	73927	71.560.744.861	78.412.498.212
Pajak daerah	3611,5	4.782.447.000	5.342.397.000

Retribusi daerah	5991,5	6.041.515.250	6.174.007.250
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1650	2.450.000.000	2.575.000.000
Lain-lain PAD yang sah	62674,5	58.286.782.611	64.321.093.962
Dana Perimbangan	333587	369.743.737.500	439.209.044.203
DBH	14084	13.749.074.000	10.777.005.703
DAU	289916,5	306.656.760.000	306.656.760.000
DAK	29586,5	49.337.903.500	121.775.278.500
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	194794	177.405.747.565	232.756.128.454
Hibah			
Dana darurat			
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	14787,5	12.745.278.835	11.514.198.224
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	88072	86.870.256.000	137.826.270.000
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	91934,5	77.790.212.730	83.415.660.230
Lain-lain	629585	637.084.658.866	748.604.149.808
Belanja	358264,5	399.943.845.508	419.357.330.163
Belanja Tidak Langsung	254632,5	262.218.993.697	263.866.006.482
Belanja Pegawai	19	12.500.000	12.500.000
Belanja Bunga	#VALUE!	0	#VALUE!
Belanja Subsidi	1308	8.787.500.000	2.229.000.000
Belanja Hibah	30849	7.337.545.000	7.375.575.000
Belanja Bantuan sosial	960,5	1.082.396.225	1.151.640.425
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	69495,5	119.504.910.586	142.622.608.257
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	0	0	0
Belanja tidak terduga	1000	1.000.000.000	2.100.000.000
Belanja Langsung	271320,5	237.140.813.359	329.246.819.645
Belanja Pegawai	46271,5	42.670.866.937	43.980.931.753
Belanja Barang dan jasa	92350,5	87.915.946.473	114.378.979.856
Belanja Modal	132698,5	106.553.999.950	170.886.908.036
Pembiayaan Netto	27276,5	18.374.428.940	-1.773.521.060
Penerimaan Pembiayaan	28250	19.322.950.000	
SilPA TA sebelumnya	28250	19.322.950.000	
Pencairan dana cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
Pengeluaran Pembiayaan	973,5	948.521.060	1.773.521.060
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	950	925.000.000	1.750.000.000
Pembayaran Pokok Utang	23,5	23.521.060	23.521.060
Pemberian Pinjaman Daerah			-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan			-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga			-

Uraian	2018	2019
Pendapatan	628.461.990.482	538.294.473.679
PAD	76.532.222.040	81.229.399.644
Pajak daerah	5.686.750.000	5.686.750.000
Retribusi daerah	6.282.559.500	4.200.952.500
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.650.000.000	2.750.000.000
Lain-lain PAD yang sah	61.912.912.540	68.591.697.144
Dana Perimbangan	420.897.151.500	320.478.804.500
DBH	8.303.657.000	8.627.840.500
DAU	301.868.747.500	311.850.964.000
DAK	110.724.747.000	#VALUE!
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.032.616.942	136.586.269.535
Hibah	#VALUE!	11.113.400.000
Dana darurat	#VALUE!	#VALUE!
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	14.694.343.942	14.754.538.035
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	116.338.273.000	110.718.331.500

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	#VALUE!	#VALUE!
Lain-lain	#VALUE!	#VALUE!
Belanja	643.588.469.422	542.232.713.149
Belanja Tidak Langsung	383.202.963.007	358.049.537.005
Belanja Pegawai	237.909.122.421	201.406.358.619
Belanja Bunga	5.000.000	1.500.000
Belanja Subsidi	#VALUE!	#VALUE!
Belanja Hibah	3.371.300.000	1.440.000.000
Belanja Bantuan sosial	7.360.975.000	7.860.975.000
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1.196.930.950	988.770.250
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	130.322.084.636	143.107.783.136
Belanja tidak terduga	3.037.550.000	3.244.150.000
Belanja Langsung	260.385.506.415	184.183.176.144
Belanja Pegawai	54.471.045.591	54.778.483.694
Belanja Barang dan jasa	111.766.897.949	90.819.492.516
Belanja Modal	94.147.562.875	38.585.199.934
Surplus/Defisit	-126.478.940	3.938.239.470
Pembiayaan Daerah	126.478.940	3.950.000.000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	3.950.000.000
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	1.000.000.000	#VALUE!
Pencairan Dana Cadangan	#VALUE!	#VALUE!
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	#VALUE!	#VALUE!
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	#VALUE!	#VALUE!
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	#VALUE!	#VALUE!
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	#VALUE!	#VALUE!
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	#VALUE!	11.760.530
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	873.521.060	
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	850.000.000	11.760.530
Pembayaran Pokok Utang	23.521.060	
Pemberian Pinjaman Daerah		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
SILPA		0

REAL APBD

No	2012
Daerah	Kab. Aceh Tengah
Pendapatan	675.022.948.215
PAD	55.832.062.050
Pajak daerah	5.060.477.081
Retribusi daerah	6.782.789.904
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.239.605.465
Lain-lain PAD yang sah	41.749.189.600
Daper	531.383.760.737
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	35.413.506.737
Dana Alokasi Umum	449.223.044.000
Dana Alokasi Khusus	46.747.210.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	87.807.125.428
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	12.139.475.228
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64.636.899.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	-
Lain-lain	11.030.751.200
Belanja	653.437.134.122
Belanja Tidak Langsung	445.078.647.508
Belanja Pegawai TL	397.389.204.063
Belanja Bunga	40.749.582
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	19.493.738.235
Belanja Bantuan Sosial	4.390.000.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	23.221.340.628
Belanja Tidak Terduga	543.615.000
Belanja Langsung	208.358.486.614
Belanja Pegawai L	-
Belanja Barang dan jasa	73.827.697.287
Belanja Modal	134.530.789.327
Pembiayaan	853.203.488
Penerimaan	2.750.245.607
SiLPA TA sebelumnya	2.750.245.607
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Pencairan dana cadangan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Pengeluaran	1.897.042.119
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.850.000.000
Pembayaran Pokok Utang	47.042.119
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-

Uraian	2013	2014
Pendapatan Daerah	791.918.900.910	1.041.692.811.099
Pendapatan Asli Daerah	76.870.446.782	132.068.284.863
Hasil Pajak Daerah	5.929.486.657	6.685.996.921
Hasil Retribusi Daerah	7.315.624.211	9.999.224.701
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.191.889.748	3.623.266.435
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.433.446.166	111.759.796.806
Dana Perimbangan	589.608.668.205	641.572.838.078
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.942.323.205	28.435.211.078
Dana Alokasi Umum	513.863.035.000	564.691.527.000
Dana Alokasi Khusus	41.803.310.000	48.446.100.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	125.439.785.923	268.051.688.158
Pendapatan Hibah	-	-
Dana Darurat	-	4.496.590.200
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	12.785.608.194	13.754.385.850
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.931.831.000	64.491.572.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pendapatan Lain-Lain	64.722.346.729	185.309.140.108
Belanja Daerah	720.093.940.152	1.075.688.189.851
Belanja Tindak Langsung	486.334.852.874	652.537.350.937
Belanja Pegawai	441.807.266.342	525.522.054.922
Belanja Bunga	36.726.828	27.744.723
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	3.770.400.000	11.511.850.030

Belanja Bantuan Sosial	9.108.220.000	81.727.370.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	29.434.209.452	33.302.197.807
Belanja Tidak Terduga	2.178.030.252	446.133.455
Belanja Langsung	233.759.087.278	423.150.838.914
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang dan Jasa	105.728.925.629	171.202.509.038
Belanja Modal	128.030.161.649	251.948.329.876
SURPLUS/DEFISIT	71.824.960.758	- 33.995.378.752
Pembiayaan Daerah	23.415.998.061	92.343.916.701
Penerimaan Pembiayaan Daerah	25.963.040.181	95.240.958.820
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.963.040.181	95.240.958.820
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan piutang daerah		
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.547.042.120	2.897.042.119
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.850.000.000
Pembayaran Pokok Utang	47.042.120	47.042.119
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Lainnya		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	95.240.958.820	58.348.537.949

2015

Pendapatan	1.366.215.232.572
PAD	157.886.839.912
Pajak daerah	9.838.059.366
Retribusi daerah	7.698.231.984
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.949.850.248
Lain-lain PAD yang sah	135.400.698.314
Daper	774.768.953.997
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.104.878.997
Dana Alokasi Umum	579.832.765.000
Dana Alokasi Khusus	170.831.310.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	433.559.438.663
Hibah	50.418.000.000
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	23.127.875.865
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	176.144.320.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	183.869.242.798
Lain-lain	-
Belanja	1.319.893.163.274
Belanja Tidak Langsung	675.277.550.177
Belanja Pegawai TL	472.080.301.569
Belanja Bunga	23.829.447
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	3.601.000.000
Belanja Bantuan Sosial	57.697.940.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	1.916.816.810
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	138.981.759.716
Belanja Tidak Terduga	975.902.636
Belanja Langsung	644.615.613.097
Belanja Pegawai L	80.866.781.688
Belanja Barang dan jasa	178.894.389.201
Belanja Modal	384.854.442.208
Surplus/Defisit	46.322.069.297
Pembiayaan	56.401.495.829
Penerimaan	58.348.537.949

SILPA TA sebelumnya	58.348.537.949
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Pencairan dana cadangan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Pengeluaran	1.947.042.120
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.900.000.000
Pembayaran Pokok Utang	47.042.120
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-
SILPA	102.723.565.126

2016 2017 2018

Pendapatan	1.531.103.326.189	1.508.729.337.576	1.262.011.455.706
PAD	156.130.102.890	163.000.739.413	150.818.710.372
Pajak daerah	11.465.487.062	11.022.306.411	11.735.708.817
Retribusi daerah	6.063.907.207	5.597.836.308	5.316.629.380
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.299.533.369	5.371.551.816	5.700.465.286
Lain-lain PAD yang sah	133.301.175.253	141.009.044.878	128.065.906.889
Daper	1.013.908.813.619	875.816.161.614	829.534.775.825
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	17.786.532.944		15.171.845.759
Dana Alokasi Umum	613.313.520.000	875.816.161.614	603.737.495.000
Dana Alokasi Khusus	382.808.760.675		210.625.435.066
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	361.064.409.680	469.912.436.549	281.657.969.509
Hibah	1.700.051.000		22.050.505.257
Dana darurat	-		-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi	29.262.224.453	194.248.430.963	

dan Pemda lainnya			26.930.918.252
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	329.320.937.460	275.652.540.000	232.676.546.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	-		-
Lain-lain	781.196.766	11.465.586	-
Belanja	1.608.908.395.282	1.505.064.617.261	1.237.325.224.753
Belanja Tidak Langsung	870.744.469.530	858.196.298.843	872.006.825.615
Belanja Pegawai TL	494.031.175.137	504.014.603.893	557.819.508.525
Belanja Bunga	18.271.290	4.225.705	4.926.682
Belanja Subsidi	-		-
Belanja Hibah	94.435.581.962	43.794.427.847	37.452.779.557
Belanja Bantuan Sosial	40.330.560.000	20.607.610.000	13.065.420.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	2.170.251.497	2.156.312.083	2.494.380.040
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	238.813.338.894	285.953.698.793	260.541.652.061
Belanja Tidak Terduga	945.290.750	1.665.420.522	628.158.750
Belanja Langsung	738.163.925.752	646.868.318.418	365.318.399.138
Belanja Pegawai L	-		-
Belanja Barang dan jasa	226.103.637.243	235.603.867.324	184.487.114.016
Belanja Modal	512.060.288.509	411.264.451.094	180.831.285.122
Surplus/Defisit	(77.805.069.093)	3.664.720.315	24.686.230.953
Pembiayaan	99.126.472.007	19.323.610.794	26.240.016.262
Penerimaan	102.723.565.126	21.370.652.914	27.987.058.381
SiLPA TA sebelumnya	102.723.565.126	21.370.652.914	22.987.058.381
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-		

yang Dipisahkan			-
Pencairan dana cadangan		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		-	5.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
Pengeluaran	3.597.093.119	2.047.042.120	1.747.042.119
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.550.051.000	2.000.000.000	1.700.000.000
Pembayaran Pokok Utang	47.042.119	47.042.120	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	47.042.119
Pembayaran Kegiatan Lanjutan		-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
SILPA	21.321.402.914		

2019

Pendapatan	178.816.877.234
PAD	178.816.877.234
Pajak daerah	11.373.500.000
Retribusi daerah	7.397.026.200
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
Lain-lain PAD yang sah	160.046.351.034
Dana Perimbangan	0
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	0
Dana alokasi umum	0
Dana alokasi khusus	0
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0
Hibah	0
Dana darurat	2.178.284.480.153
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	0

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0
Lain-lain	0
Belanja	947.520.227.170
Belanja Tidak Langsung	0
Belanja Pegawai TL	0
Belanja Bunga	0
Belanja Subsidi	0
Belanja Hibah	0
Belanja Bantuan sosial	0
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0
Belanja tidak terduga	0
Belanja Langsung	331.441.522.892
Belanja Pegawai L	0
Belanja Barang dan jasa	0
Belanja Modal	188.295.125.750
Surplus/Defisit	0
Pembiayaan	0
Penerimaan	0
SiLPA TA sebelumnya	0
Pencairan dana cadangan	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0
Pengeluaran	0
Pembentukan Dana Cadangan	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0
Pembayaran Pokok Utang	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0

Status

0

	(Constant)	14,168	,382		37,095	,000		
1	PAJAK (X1)	-,056	,022	-,284	-2,492	,019	,880	1,136
	RETRIBUSI (X2)	,055	,012	,669	4,669	,000	,558	1,791
	SARANA PRA SARANA (X3)	,005	,007	,109	,760	,453	,558	1,791

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 ^a	,679	,644	1,7345548	1,127

a. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	14,168	,382		37,095	,000	
1	PAJAK (X1)	-,056	,022	-,284	-2,492	,019	,880
	RETRIBUSI (X2)	,055	,012	,669	4,669	,000	,558
	SARANA PRA SARANA (X3)	,005	,007	,109	,760	,453	,558

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	178,007	3	59,336	19,722	,000 ^b
1 Residual	84,243	28	3,009		
Total	262,250	31			

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

b. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 ^a	,679	,644	1,7345548	1,127

a. Predictors: (Constant), SARANA PRA SARANA (X3), PAJAK (X1), RETRIBUSI (X2)

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN DAERAH (Y)

Sumber: Output SPSS v.20.0

		Pertumbuhan Pajak	Pertumbuhan Retribusi	Pertumbuhan Usaha Pengadaan Sarana Pra Sarana	Rasio Kemandirian Daerah
2012		33,2079	-47,037	-1,7375	9,1805
	1 sem	25,8075	-46,0189	0,1521	9,1805
		25,8075	-44,94	1,5829	9,1805
	1 period/2 sem	25,8075	-45,7152	-1,0803	9,1805
2013		15,0026	12,004	-1,1718	11,8203
	1 sem	17,1725	7,8557	-4,8321	11,8203
		17,1725	9,3748	-3,4917	11,8203
	1 period/2 sem	17,1725	7,8557	-4,8321	11,8203
2014		11,3267	34,152	93,144	18,3474
	1 sem	15,6925	36,6831	96,7883	18,3474
		12,7584	32,8864	91,3219	18,3474
	1 period/2 sem	12,7584	36,6831	96,7883	18,3474
2015		-20,4791	-55,29	-49,844	13,594
	1 sem	-24,8969	-54,4299	-94,8879	13,0253
		32,8386	-21,912	54,9335	13,6355
	1 period/2 sem	-13,5000	-23,0117	52,7513	13,6355
2016		17,1827	-2,1022	88,2098	11,3757
	1 sem	19,3937	-5,7280	81,2390	13,1050
		29,0929	-20,12	34,927	11,3757

	1 period/2 sem	16,5422	-21,2299	33,0530	11,3757
2017		-0,2471	-25,339	9,9753	12,1126
	1 sem	3,6648	-23,9299	12,0503	13,2017
		-3,8653	-10,25	-21,915	12,1126
	1 period/2 sem	-3,8653	-7,6860	-19,6844	12,1126
2018		27,9243	-39,353	-92,681	13,8475
	1 sem	20,8173	-38,1867	-92,5406	10,8434
		6,4724	-3,6667	-55,402	13,8475
	1 period/2 sem	6,4724	-5,0235	-56,0304	13,8475
2019		-1,5239	74,6483	93,5455	17,2378
	1 sem	0,3341	68,1799	86,3771	17,1615
		-3,0864	41,0896	5,5941	17,2378
	1 period/2 sem	-3,0864	39,13	4,1275	17,2378

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Mahdanur I Amal
2. Nim : 0502162152
3. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa , 9 November 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. No. Telp : 082295427009
7. Alamat : Pinangan Dusun Amal no.31 Kec. Kebayakan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 10 Linge Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan MTsN 2 Takengon Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan MAN 1 Takengon Berijazah Tahun 2016

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Merpati Putih kolat UINSU masuk pada Tahun 2016
2. Mustada 1 LDK AL IZZAH UINSU 2016

